

Analisis penerapan teori pembangunan rostow terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur

Syarifatul Fitriyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : March, 12th 2025

Revised : March, 25th 2025

Accepted : April, 15th 2025

Keywords:

Capital City of the State

National Development

Rostow's Development Theory

Stages of Economic Growth

ABSTRACT

This study analyzes the development of Indonesia's new capital city (IKN) in East Kalimantan through the lens of Rostow's Stages of Economic Growth. Using a qualitative descriptive approach, the research examines government policies, official reports, and related literature. Findings indicate that IKN is currently in the "preconditions for take-off" stage, moving toward "take-off," marked by major infrastructure investments and structural economic transformation. However, challenges such as human resource readiness, socio-ecological impacts, and financial sustainability remain. This study offers insights into the dynamics of IKN development and contributes to understanding how classical economic growth theories apply to modern national development strategies.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Ibu Kota Negara

Pembangunan Nasional

Tahapan Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pembangunan Rostow

Penelitian ini menganalisis pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur melalui pendekatan Teori Tahapan Pertumbuhan Ekonomi Rostow. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN saat ini berada pada tahap "prasyarat lepas landas" dan bergerak menuju tahap "lepas landas", ditandai oleh investasi besar pada infrastruktur dan transformasi ekonomi struktural. Namun, tantangan seperti kesiapan sumber daya manusia, dampak sosial-ekologis, dan kesinambungan pembiayaan masih perlu diatasi. Studi ini memberikan wawasan mengenai dinamika pembangunan IKN dan penerapan teori pertumbuhan ekonomi klasik dalam strategi pembangunan nasional modern.

© 2025

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

*Corresponding author :

Address : Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

E-mail : syarifatulfitriyah74@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Di pertengahan tahun 2019 isu pemindahan Ibu Kota Negara menjadi isu yang hangat diperbincangkan di masyarakat Indonesia. Ibu Kota Negara Indonesia yang awalnya berada di kawasan DKI Jakarta akan dipindahkan ke wilayah kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sehingga dalam proses ini akan menciptakan pembentukan wilayah administratif baru dengan nama Nusantara yang nantinya akan menjadi Ibu Kota Negara yang baru. Proses pemindahan ini akan ditargetkan selesai pada tahun 2045 (Kurniawan, 2024). Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Pemerintah telah mencanangkan rencana pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur, yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada awal tahun 2022. Pertimbangan utama pemindahan ini antara lain adalah untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk dan ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia (Choti, 2022). Selain itu, pemindahan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan sosial di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi IKN baru karena memenuhi berbagai kriteria strategis, seperti ketersediaan lahan yang luas, minim risiko bencana alam, serta letaknya yang relatif sentral dalam konteks geografis Indonesia. Lokasi ini mencakup wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemindahan ini diharapkan tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. (Manda Kumoro Saraswati, 2022).

Dalam konteks teori pembangunan ekonomi, W. W. Rostow mengembangkan model tahapan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari lima fase. Fase-fase tersebut meliputi masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, dan konsumsi massa tinggi. Setiap fase mencerminkan perubahan struktural dalam masyarakat yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Teori ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana suatu negara atau wilayah dapat bertransisi dari kondisi tradisional menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

Berdasarkan UU IKN, pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara dirancang menjadi 5 tahapan. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2022-2024, tahap kedua pada tahun 2025-2029, tahap ketiga pada tahun 2030-2034, tahap keempat pada tahun 2035-2039, dan tahap kelima pada tahun 2040-2045 (Tasya, 2024). Pada tahap pertama hingga ketiga ditargetkan di antaranya penyelesaian permasalahan kepemilikan lahan yang tumpang tindih, pembangunan sarana umum, maupun penguatan pelibatan tokoh dan masyarakat adat dan lokal dalam berbagai aspek pembangunan dan peluang ekonomi (Lazuardi, 2022).

Penerapan Teori Pembangunan Rostow dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sangat relevan untuk dianalisis. Proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik semata, tetapi juga melibatkan transformasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Diharapkan proses ini dapat mendorong Indonesia untuk memasuki tahap "tinggal landas" dalam kerangka Rostow, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan. Namun, kita perlu mempertimbangkan berbagai tantangan yang mungkin

muncul, seperti kesiapan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan Teori Pembangunan Rostow dapat diterapkan dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Dengan memahami posisi serta tahapan yang saat ini sedang atau akan dilalui dalam proses tersebut, diharapkan kita dapat memperoleh wawasan mengenai kesiapan dan strategi yang diperlukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan kerangka teori Rostow. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pemindahan IKN, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan proyek ini.

II. KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian Pustaka ini akan membahas penerapan Teori Tahapan Pertumbuhan Ekonomi Rostow dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Teori Rostow mengklasifikasikan pembangunan ekonomi suatu negara ke dalam lima tahap (Istianto, 2021) : Tahap Perekonomian Tradisional, Pada tahap ini, ekonomi didominasi oleh sektor pertanian dan produksi berbasis tradisi lokal. Industri dan teknologi masih sangat terbatas. Tahap Prakondisi Tinggal Landas, Pada tahap ini, negara mulai mengalami perkembangan sektor industri, dan infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi dan pendidikan mulai dibangun. Tahap Tinggal Landas, Tahap ini ditandai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Investasi dalam sektor industri dan teknologi meningkat, dan masyarakat mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Tahap Menuju Kedewasaan, Di tahap ini, ekonomi mencapai tingkat kematangan dengan industri yang berkembang pesat, teknologi canggih, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ekspor menjadi salah satu motor penggerak ekonomi (Mahmudin, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis relevansi dan penerapan Teori Rostow dalam konteks pembangunan di Indonesia: Menerapkan Teori Rostow dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang: Artikel ini membahas bagaimana Indonesia saat ini berada pada tahap 'gerak menuju kedewasaan' menurut Teori Rostow. Penulis menyoroti tantangan seperti asumsi universalitas tahapan pembangunan yang mungkin tidak sesuai dengan konteks unik Indonesia, serta peluang yang ditawarkan teori ini dalam memberikan kerangka kerja terstruktur untuk strategi pembangunan. Analisis Ekonomi Pembangunan: Studi ini menguraikan lima tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow dan mengkritisi bahwa teori ini cenderung mengabaikan peran faktor eksternal seperti politik dan lingkungan global dalam pembangunan ekonomi (Mahmudin, 2024). Aplikasi Teori Rostow dalam Pembangunan Indonesia: Penelitian ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada peningkatan tingkat tabungan dan investasi, tetapi juga memerlukan perubahan multidimensional dalam masyarakat, seperti penerimaan teknologi baru dan inovasi.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah meningkatkan daya saing wilayahnya, termasuk kemampuan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan yang berkelanjutan dan tinggi. Setiap wilayah memiliki keunggulan ekonomi tersendiri yang menjadi motor penggerak pertumbuhannya. Oleh karena itu, strategi kebijakan pemerintah daerah harus disesuaikan dengan potensi unik masing-masing

wilayah. Kabupaten Penajam Paser Utara, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan akan menjadi ibu kota negara baru, mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Ellisa Wulan Oktavia, 2024). Pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan bertujuan untuk meratakan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi keunggulan ekonominya secara efektif. Hal ini penting untuk mendukung perekonomian yang kompetitif, sehingga wilayah tersebut dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan sesuai dengan potensi yang dimiliki (Mesoino, 2022)

Dari kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Teori Rostow dalam konteks pembangunan IKN menawarkan wawasan berharga mengenai proses dan tahapan yang diperlukan. Namun, penting untuk mempertimbangkan kritik terhadap teori ini, terutama terkait dengan asumsi linearitas tahapan dan kurangnya perhatian terhadap faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses pembangunan.

III. METODA PENELITIAN

Penelitian kepustakaan, atau yang sering disebut sebagai studi kepustakaan, merupakan metode yang digunakan sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data untuk penelitian ini. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh landasan teori yang solid sebagai bahan pembandingan sekaligus untuk memperkaya pemahaman dalam menganalisis topik yang diteliti. Dalam prosesnya, peneliti melakukan telaah secara sistematis dengan membaca dan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti buku, skripsi, tesis, dan jurnal akademik. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari institusi terpercaya, termasuk universitas, lembaga penelitian, serta penerbit jurnal ilmiah yang memiliki reputasi tinggi. Dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap literatur yang tersedia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendetail mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal hakekatnya pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat, di negara berkembang perhatian utama pembangunan terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan, dimana pertumbuhan yang paling sering dijadikan pembicaraan adalah pertumbuhan ekonomi (Alvena Adhina Putri, 2024).

Pada dasarnya, semua kegiatan pembangunan menimbulkan dampak bagi pembangunan. Dari mulai perencanaan, pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya bagi lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya yang dapat digunakan dalam pertimbangan perlu tidaknya dibuat analisis mengenai dampak lingkungan (Ristawati, 2023). Dalam upaya pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) tentu harus mempertimbangkan dampak serta manfaat dari pindahnya ibu kota negara

ke lokasi yang baru. Jika melihat kondisi sekarang yang terjadi di ibu kota, Jakarta memiliki beban berat untuk menjalankan roda perekonomian serta roda pemerintahan sekaligus, tampaknya menjadi suatu keputusan yang tepat jika Indonesia mengupayakan untuk memindahkan ibu kota negaranya ke lokasi baru yang lebih strategis dan bisa dikembangkan (Adinugraha, 2022).

Salah satu latar belakang pemindahan IKN adalah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia sehingga aktivitas-aktivitas ekonomi yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat berpindah ke Pulau di luar Jawa (Manda Kumoro Saraswati, Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot, 2022). Berikut merupakan tabel Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2021-2045 yang menunjukkan kesenjangan ekonomi yang tidak merata.

Tabel 1. Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2021-2045

Wilayah	Presentase Persebaran Jumlah Penduduk Secara Nasional (%)	Kontribusi Ekonomi Untuk Nasional (%)
Pulau Jawa	57%	59,0%
Pulau Sumatera	22 %	21,31%
Pulau Kalimantan	6 %	8,05%
Pulau Sulawesi	7,4 %	6,33%
Bali & Nusa Tenggara	5,6%	3,06%
Maluku & Papua	2,8%	2,24%

Sumber: *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil Supas 2015 (angka tahun 2019) & BPS (Feb 2020)*

Jika pertumbuhan ekonomi dibiarkan tumbuh lebih dominan di Pulau Jawa, maka akan menimbulkan disparitas pertumbuhan ekonomi regional. Konsekuensi dari adanya gap pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kesenjangan antar daerah yang semakin meningkat.

Perpindahan ibu kota baru ini akan lebih optimal jika didukung oleh produktivitas, inovasi, serta teknologi yang baik. Tentunya dalam pembangunan ibu kota baru tersebut pastinya bakal menarik banyak tenaga kerja baru sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan angka kemiskinan (Amila, 2023). Pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan mendorong perkembangan perdagangan antar daerah di Indonesia. Lebih dari 50% wilayah Indonesia diperkirakan akan merasakan peningkatan arus perdagangan sebagai dampak dari pemindahan ibu kota. Selain itu, perpindahan ini juga akan mendorong peningkatan investasi di provinsi ibu kota yang baru serta di sekitarnya. Selain itu, perpindahan ibu kota akan memberikan dorongan investasi yang lebih luas pada daerah lain dan dapat meningkatkan output (Pembukuan, 2022). Dengan adanya bauran kebijakan tersebut, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sambil tetap menjaga tingkat inflasi. Secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat di lokasi IKN yang baru diharapkan dapat meningkat dan berpotensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di luar Pulau Jawa (Amila, 2023).

Skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu metode pembiayaan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun yang akan datang, yang berkaitan dengan berbagai rencana dan proyek jangka panjang. Dalam kerangka skema APBN ini, pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah (Siswantoro, 2022). Lebih dari 80% pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan perpajakan. Dana yang diperoleh negara setiap tahunnya tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk pembangunan berbagai proyek strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Lestari, 2019).

Pemindahan IKN ke lokasi yang baru diharapkan membawa dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi harapan ke depan berkenaan dan sejalan dengan niat Pemerintah di balik pengambilan kebijakan tersebut. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, selaku Deputy Bidang Pengembangan Regional Bappenas, menjelaskan bahwa total luas wilayah Ibu Kota Negara adalah 256.142,72 hektar. Terdiri dari 5.664 hektar rencana kawasan Inti Pusat Pemerintah, 56.180,87 hektar rencana kawasan Ibu Kota Negara dan selebihnya rencana kawasan perluasan Ibu Kota Negara. Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara (Mazda, 2022).

Pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat Kalimantan, baik dari segi ekologi, ekonomi, sosial, maupun budaya. Langkah ini diharapkan tidak akan mengakibatkan masyarakat lokal terpinggirkan oleh kedatangan pendatang, yang tidak hanya terdiri dari pejabat pemerintahan, tetapi juga keluarga serta pelaku ekonomi lainnya.

Dalam rencana pemindahan pejabat pemerintahan, misalnya untuk aparatur sipil negara (ASN), berkembang dua skenario yang memperkirakan perpindahan sebesar 182.462 orang ASN dan 118.513 orang ASN (jika dibatasi umur hingga 45 tahun). Perpindahan ASN tersebut akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, yang diperkirakan sebesar 1,5 juta orang di masa mendatang. Masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia umumnya (Politik, 2022).

Perpindahan pejabat pemerintahan beserta keluarga mereka berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan fasilitas pendukung kehidupan, seperti tempat tinggal, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Hal ini menjadi solusi untuk permasalahan pemerataan pembangunan di daerah. Pemindahan Ibu Kota Negara bertujuan untuk mengatasi pertumbuhan daerah yang tidak merata, sehingga dapat lebih terkelola melalui pemindahan Ibu Kota yang baru. Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara juga dapat memicu terjadinya inkulturasi, yaitu masuknya budaya Jawa ke dalam masyarakat di Kalimantan Timur. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergeseran budaya atau adat istiadat lokal. Dengan kata lain, akulturasi budaya antara masyarakat pendatang (Jawa) dan masyarakat setempat (Dayak) dapat terjadi, menciptakan satu kesatuan budaya yang baru.

Pemindahan ibu kota negara mempunyai sejumlah risiko, salah satunya adalah risiko finansial. Berdasarkan desain IKN, Bappenas menetapkan ada dua kemungkinan total kebutuhan dana: Rp466 triliun dan Rp323 triliun. Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dari suatu daerah ke daerah lain merupakan suatu keputusan yang penting karena memerlukan persiapan kelembagaan, sosial, dan modal yang tidak sedikit. Dari sisi pembiayaan, meski pemerintah mengatakan APBN akan memenuhi 19,2% dari total kebutuhan anggaran Rp 446 triliun, namun tetap terjadi risiko yang menambah beban APBN jika terjadi kegagalan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta (Rahmayani, 2024). Peran pemerintah dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan akan sangat menentukan skenario kebutuhan finansial (Bappenas, 26 Juni 2019). Pembelian lahan, pengembangan fungsi penunjang, dan pengembangan fungsi primer merupakan beberapa persyaratan pembiayaan. skenario kebutuhan pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 1 (Ahmad Baehaki).

Tabel 2. Kebutuhan Pembiayaan dari Pembangunan IKN Baru

No.	Kebutuhan Infrastruktur	Skenario I (Rp triliun)	Skenario II (Rp triliun)
1	Fungsi Utama: Gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif	32,7	20
2	Fungsi Pendukung: Gedung dan rumah ASN/Polri/TNI, fasilitas pendidikan dan kesehatan	265,1	182,2
3	Fungsi Penunjang: fasilitas sarana dan prasarana	160,2	114,8
4	Kebutuhan Pengadaan Lahan	8	6
TOTAL		466	323

Sumber: Bappenas, 2019

Infrastruktur berskala besar sangat diperlukan untuk proyek pembangunan "ibu kota baru". Proyek infrastruktur umumnya memiliki risiko jangka panjang, terutama terkait dengan kinerja yang mungkin tidak memenuhi harapan. Namun, sektor swasta optimis bahwa pendapatan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan proyeksi awal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra terhadap perjanjian kerja sama dengan sektor bisnis dan swasta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa infrastruktur baru dan IKN memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pemerintah, tanpa semakin membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sebaliknya, Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) memproyeksikan kenaikan inflasi akan lebih besar dari perkiraan Bappenas dari sudut pandang makroekonomi. Mengingat sebagian besar masyarakat menguasai sebagian besar tanah, REI memperkirakan kenaikan harga tanah akan menjadi penyebab utama inflasi (Yunianto, 2019).

Menurut analisis yang dilakukan oleh Bappenas, pengalihan Ibu Kota Negara (IKN) diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara, dengan estimasi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,1%. Bappenas menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya potensial, seperti pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur produktif, serta penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja terampil yang belum mendapatkan pekerjaan, akan menjadi pendorong utama pertumbuhan PDRB tersebut. Secara khusus, Bappenas juga memperkirakan bahwa biaya tenaga kerja

akan meningkat sebesar 1,37%, yang nantinya akan tercermin dalam kenaikan gaji tenaga kerja di wilayah sekitar (Puranidhi, 2019).

Namun rencana relokasi IKN juga akan berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Menurut perkiraan Bambang Brodjonegoro, prosedur pengalihan 7 IKN akan menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0,2%. Peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan inflasi meningkat, yang selalu diikuti dengan peningkatan biaya-biaya kebutuhan pokok. Namun karena kenaikan harga hanya terbatas pada fasilitas IKN baru dan sekitarnya, inflasi diperkirakan tidak akan berdampak besar terhadap daya beli negara (Puranidhi, 2019).

Penerapan Teori Pembangunan Ekonomi Rostow dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dapat dianalisis dengan melihat tahapan yang telah dan akan dilalui oleh proyek ini sesuai dengan model pertumbuhan lima tahap Rostow. Berikut analisisnya: Pertama, Tahap Masyarakat Tradisional (Traditional Society), yakni Sebelum proyek IKN dimulai, Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Infrastruktur dan industrialisasi di wilayah ini belum berkembang secara signifikan dibandingkan dengan Pulau Jawa. Kedua, Tahap Prakondisi untuk Lepas Landas (Preconditions for Take-Off), Pembangunan IKN saat ini berada dalam fase investasi infrastruktur yang besar seperti jalan, sistem air, listrik, serta perumahan bagi pekerja dan pegawai pemerintah. Pemerintah juga mulai menarik investasi domestik dan asing untuk mendukung pertumbuhan sektor industri, teknologi, dan jasa. Fokus utama tahap ini adalah menciptakan fondasi ekonomi yang memungkinkan percepatan pertumbuhan di masa depan (Ridho Harta, 2024). Ketiga Tahap Lepas Landas (Take-Off), Diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, ketika pembangunan infrastruktur utama selesai dan ekonomi mulai tumbuh secara mandiri, IKN akan memasuki tahap lepas landas. Pada tahap ini: Investasi sektor swasta akan semakin meningkat, Diversifikasi ekonomi terjadi dengan pertumbuhan sektor teknologi, industri hijau, dan ekonomi digital, Peningkatan produktivitas dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan modernisasi sistem administrasi serta ekonomi.

Keempat, Tahap Menuju Kedewasaan (Drive to Maturity), Jika IKN berhasil berkembang sesuai rencana, dalam beberapa dekade ke depan kota ini akan mencapai tahap kedewasaan ekonomi dengan: Perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan tanpa ketergantungan pada proyek pemerintah. Munculnya industri dan sektor ekonomi baru, termasuk sektor berbasis inovasi dan ekonomi kreatif. Penguatan daya saing internasional, menjadikan IKN sebagai pusat bisnis dan investasi regional. Kelima, Tahap Konsumsi Tinggi (High Mass Consumption), Dalam jangka panjang, jika IKN berkembang dengan baik, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, daya beli akan naik, dan konsumsi masyarakat akan menjadi faktor utama penggerak ekonomi. Kota ini bisa menjadi pusat urbanisasi modern yang memberikan kesejahteraan bagi penduduknya, dengan layanan publik yang maju dan infrastruktur kelas dunia.

Penerapan Teori Pembangunan Rostow dalam pembangunan IKN dapat berjalan sejauh tahap prakondisi lepas landas hingga tahap lepas landas saat ini. Namun, keberhasilan mencapai tahap menuju kedewasaan dan konsumsi tinggi akan bergantung pada keberlanjutan kebijakan ekonomi, daya tarik investasi, serta kesiapan sumber daya manusia dan teknologi. Jika pembangunan IKN dikelola dengan baik, kota ini dapat menjadi contoh sukses pertumbuhan ekonomi modern yang berbasis pada tahapan Rostow.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) adalah langkah strategis untuk mencapai pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di luar Pulau Jawa. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah serta mendorong investasi dan perdagangan antar daerah. Dari segi pembiayaan, proyek ini mengandalkan kombinasi antara APBN dan investasi swasta, yang memerlukan perencanaan yang cermat agar tidak memberatkan keuangan negara. Selain itu, pemindahan ini juga berdampak pada aspek sosial dan budaya, seperti integrasi antara masyarakat lokal dan pendatang, serta potensi akulturasi budaya yang muncul.

Dalam konteks analisis teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow, proyek ini saat ini berada pada tahap prakondisi lepas landas. Fokus utamanya adalah pada investasi infrastruktur dan pembentukan fondasi ekonomi. Keberhasilan dalam mencapai tahap kedewasaan ekonomi dan konsumsi yang tinggi akan sangat bergantung pada kesinambungan kebijakan, daya tarik untuk investasi, serta kesiapan sumber daya manusia dan teknologi. Meskipun ada berbagai tantangan, termasuk risiko finansial dan inflasi, pemindahan IKN memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi regional, serta menciptakan kota yang modern dan berdaya saing. Jika dikelola dengan baik, IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan, diperlukan serangkaian langkah strategis yang mencakup beragam aspek, mulai dari infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dilakukan sesuai dengan rencana dan didukung oleh konektivitas yang baik. Pengembangan aksesibilitas yang optimal, seperti jalan tol, jalur kereta api, bandar udara, dan pelabuhan, sangat penting untuk kelancaran mobilitas manusia dan barang. Selain itu, guna menarik investasi, regulasi yang bersahabat dengan investor harus diterapkan, termasuk insentif pajak dan kemudahan dalam perizinan bagi pelaku usaha. Kerja sama dengan sektor swasta juga perlu diperkuat untuk memastikan pendanaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

Kesinambungan lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan IKN. Penerapan konsep smart city dan green city harus dilakukan melalui penggunaan energi terbarukan serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Upaya konservasi lingkungan juga harus melibatkan masyarakat lokal agar pembangunan tidak merugikan ekosistem di sekitarnya. Di sisi lain, pemberdayaan sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan kerja bagi tenaga kerja lokal agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan IKN. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas juga harus dipastikan, sehingga kesejahteraan masyarakat di sekitar ibu kota baru dapat meningkat.

Dalam aspek sosial dan budaya, penting untuk memperhatikan mitigasi risiko akibat perpindahan penduduk. Pemerintah perlu menciptakan keseimbangan antara masyarakat lokal dan pendatang agar tidak terjadi konflik sosial. Upaya untuk harmonisasi budaya antara masyarakat Dayak dan pendatang harus didorong, sambil tetap menjaga kelestarian budaya lokal. Stabilitas ekonomi dan keuangan juga mesti dikelola dengan baik.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pembiayaan pembangunan harus dijaga agar tidak membebani APBN. Selain itu, pemerataan ekonomi harus menjadi fokus utama agar pemindahan IKN tidak semakin memperlebar kesenjangan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan IKN dapat berkembang menjadi kota modern dan berkelanjutan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, E. P. (2022). Marketing strategy of convection production products in Samong Village, Ulujami District, Pemalang. *Muamalatuna*, 14(2), 221–227.
- Alvena Adhina Putri, A. A. (2024). Teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(1), 182–192.
- Amila, S. (2023). Analisis dampak dan resiko pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi di Indonesia. *Legal Studies Journal*, 2(1), 10–18.
- Choti, S. J. (2022). Analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13, 155–168.
- Ellisa Wulan Oktavia, N. I. (2024). Dampak pemindahan IKN Nusantara dan tantangannya terhadap pembangunan perekonomian lokal. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2), 1107–1121.
- Istianto, T. K. (2021). Analisis pengaruh belanja daerah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Bolaang Mongondow Raya. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 75–95.
- Kurniawan, C. (2024). Analisis teori modernitas terhadap dampak transformasi sosial-budaya dan ekonomi masyarakat lokal di Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*, 1, 51–56.
- Lazuardi, V. A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi persoalan pertanahan masyarakat hukum adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 71–84.
- Lestari, N. N. (2019). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–33.
- Mahmudin, H. S. (2024). *Analisis ekonomi pembangunan*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Manda Kumoro Saraswati, E. A. (2022). Pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis SWOT. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 4042–4052.
- Mazda, C. N. (2022). Analisis dampak pemindahan ibu kota negara (IKN) terhadap social security. *Jurnal Enersia Publika*, 6(1), 1–12.
- Mesoino, L. S. (2022). Analisis strategi pengembangan daya saing berdasarkan potensi ekonomi lokal di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(24), 112–123.
- Pembukuan, P. (2022). *Jurnal Abdimas Kesosi*, 5(2), 2809–8870.
- Puranidhi, A. L. (2019, Juni 26). Pemindahan ibu kota dongkrak inflasi 0,2 persen. *Liputan6.Com*.
- Rahmayani, A., & [Nama Penulis Lain]. (2024). Dampak pengambilan keputusan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara dalam aspek geografi, sosial politik, dan ekonomi. *Journal of Government, Social and Politics*, 10.
- Ridho Harta, R., & [Nama Penulis Lain]. (2024). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ibu kota negara. *Muqoddimah*, 8(4), 1783–1790.

- Ristawati, K. N. (2023). Pembangunan Mandalika: Perspektif lingkungan dan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. *Open Journal System*, 18(3), 721–729.
- Siswantoro. (2022). Analisis tingkat kesiapan anggaran dan pembiayaan Indonesia dalam memindahkan ibu kota negara: Studi kepustakaan. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 27–41.
- Tasya, N. (2024). Kebijakan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) perspektif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1, 122–132.
- Yunianto, F. (2019). Pemindahan ibu kota ke Kalimantan diyakini tingkatkan arus perdagangan. *Antara News*.